



## BUPATI BOYOLALI

---

Yth.

1. Sekretaris Daerah
  2. Sekretaris DPRD
  3. Inspektur Daerah
  4. Kepala Badan
  5. Kepala Dinas
  6. Camat
  7. Direktur RSUD
  8. Direktur BUMD
  9. Lurah
  10. Kepala UPT SMPN
  11. Kepala UPT Puskesmas
  12. Kepala UPT SKB
  13. Kepala UPT Labkesda
  14. Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan
  15. Kepala Desa
  16. Pengurus PKK
  17. Pengurus Dharma Wanita Persatuan
- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
18. Masyarakat Boyolali

SURAT EDARAN  
NOMOR 100.3.4.2/2/3/2026  
TENTANG

GEBYAR INTEGRITAS BOYOLALI

### A. LATAR BELAKANG

Jika berbicara mengenai korupsi, patut disadari bahwa penanganannya bukan hanya merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum saja, akan tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang baik sangat penting, mengingat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah, maka cukup sulit untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Penyelenggara Negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Layanan Umum Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Dharma Wanita Persatuan, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan *core values* BerAKHLAK, harus memiliki nilai integritas

agar bisa menghindarkan dirinya dari upaya menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang mengarahkan pada terjadinya tindak pidana korupsi. Penanaman nilai integritas dan antikorupsi tersebut harus dilakukan sedini mungkin, untuk membentuk aparatur pemerintahan yang berintegritas dan anti terhadap berbagai praktik korupsi. Aparatur Negara harus menjadi pelopor, suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat dalam implementasinya. Nilai integritas ini juga mengarahkan untuk bertindak secara konsisten, tulus dan setia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan prinsip hidup yang dijunjungnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara Negara, ASN, P3K, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, CPNS, PKK, Dharma Wanita Persatuan, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali diminta mencermati area rawan korupsi agar tidak mudah terjebak di dalam aktivitas yang merugikan negara maupun diri sendiri. Area rawan korupsi ada delapan pintu, yakni pada perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi, pengadaan barang/jasa dan sektor pelayanan umum, sektor perizinan, tata kelola keuangan desa, manajemen aset, dan jual beli jabatan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Penyelenggaraan Gebyar Integritas Boyolali dimaksudkan sebagai sarana penguatan komitmen kolektif dan internalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi seluruh elemen aparatur pemerintah dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat fondasi etika kerja yang bersih dan transparan di Kabupaten Boyolali.

### 2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. **Mewujudkan Visi dan Misi:** Mendukung pencapaian Misi Keempat Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis dengan Didukung Aparatur Profesional, Berintegritas, Responsif dan Inovatif.
- b. **Penguatan Karakter Aparatur:** Mencetak aparatur pemerintah yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi, responsif terhadap keluhan masyarakat, serta inovatif dalam memberikan solusi.
- c. **Budaya Anti-Korupsi:** Membangun ekosistem kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di seluruh tingkat instansi hingga pemerintahan desa.
- d. **Pelayanan Publik Prima:** Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akuntabel guna menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat (membuat masyarakat tersenyum).

## C. RUANG LINGKUP

Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak, Aparatur Pemerintah Desa, Pegawai BUMD, Pegawai BLUD, CPNS, PKK, Dharma Wanita Persatuan, Masyarakat Boyolali dan seluruh Pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali di perintahkan untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun **peran serta yang dimaksud**, antara lain:

- a. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- b. tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

- d. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas;
- e. memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten;
- f. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya; dan
- g. menyampaikan informasi penyimpangan integritas di perangkat kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

#### D. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan, Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN;
7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B/1435/DKM.01.02/80-83/03/2026 tentang Ajakan Kampanye Antikorupsi Serentak dalam Program Pariwara Antikorupsi 2026.

#### E. RANGKAIAN GEBYAR INTEGRITAS

##### 1. Safari Integritas

- a. Pembelajaran Online Antikorupsi
  - 1) e-Learning Pemahaman Gratifikasi.
- b. Kampanye Serentak Pariwara Antikorupsi
  - 1) Pemasangan Spanduk/Media Luar Ruang (Kategori Konvensional).
  - 2) Publikasi Konten Media Sosial (Kategori Digital).
  - 3) Aksi Langsung di Titik Layanan Publik (Kategori On-Ground Action).
  - 4) Optimalisasi kanal siaran radio, podcast dan videotron secara terpadu (*Integrated Campaign*).
- c. Lomba Antikorupsi
  - 1) Lomba Iklan Layanan Masyarakat Antikorupsi;
  - 2) Lomba Film/Video Pendek Antikorupsi;
  - 3) Lomba Drama, Puisi, Menggambar dan Cerdas Cermat Antikorupsi;
  - 4) Lomba Poster dan Flyer Antikorupsi;
  - 5) Lomba Mars/Yel-yel Antikorupsi.
- d. Program Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi
  - 1) Restrukturisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pembantu Unit Kerja;
  - 2) Transformasi Platform JAGABOY.
- e. 5K *Run for Integrity*

##### 2. Rembug Integritas

- a. Talkshow Antikorupsi;
- b. Sosialisasi Pencegahan Korupsi, SPI, LHKPN, Pengendalian Gratifikasi dan MCSP.

### 3. Grebeg Integritas

- a. Gelar Pengawasan Daerah;
- b. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

## F. PELAKSANAAN GEBYAR INTEGRITAS

Dalam rangka memperkuat sinergi dan peran serta nyata seluruh elemen pemerintah daerah pada Gebyar Integritas Boyolali, maka diperintahkan kepada unit kerja terkait untuk memedomani dan melaksanakan poin-poin berikut:

### 1. Safari Integritas

#### a. Pembelajaran Online Antikorupsi

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan ekosistem kerja yang berintegritas dan bebas dari praktek gratifikasi, Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali menyelenggarakan agenda **Safari Integritas**. Fokus utama kegiatan ini adalah mewajibkan pembelajaran mandiri melalui platform *e-Learning* Antikorupsi bagi CPNS, PPPK, serta pegawai BLUD dan BUMD. Melalui partisipasi aktif ini, diharapkan setiap personil memiliki kompetensi dasar dalam mengidentifikasi dan menolak gratifikasi, yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan sebagai wujud akuntabilitas personal.

##### 1) e-Learning Pemahaman Gratifikasi

Peserta:

- a) CPNS Angkatan 2025
- b) PPPK Penuh Waktu
- c) PPPK Paruh Waktu
- d) Pegawai BLUD yang belum pernah mengikuti
- e) Pegawai BUMD yang belum pernah mengikuti
- f) Organisasi Wanita (PKK, Dhrma Wanita)

Output dari Pembelajaran Online adalah Sertifikat dan dilaporkan kepada Inspektorat Daerah secara kolektif atau individu melalui alamat link: <https://bit.ly/SertifikatElearningKPKByl> (Jadwal pelaksanaan pembelajaran akan diinformasikan lebih lanjut).

#### b. Kampanye Serentak Pariwara Antikorupsi

Untuk membangun atmosfer integritas yang masif di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali, dilakukan langkah-langkah kampanye sebagai berikut:

- 1) **Aksi Media Luar Ruang (Konvensional):** Seluruh Perangkat Daerah hingga tingkat Desa/Kelurahan, BUMD, dan Puskesmas wajib memasang spanduk/banner bertema "Gebyar Integritas" di titik layanan publik yang paling terlihat oleh masyarakat.
- 2) **Aksi Media Digital:** Admin media sosial setiap unit kerja wajib memproduksi dan mengunggah konten kreatif (infografis/video) secara rutin sebagai bentuk keterbukaan informasi dan edukasi publik.
- 3) **Materi Resmi KPK:** Seluruh unit kerja wajib mengunduh dan menyebarluaskan materi visual resmi dari laman <https://pariwara.kpk.go.id> dengan fokus pesan: **Penolakan Gratifikasi, Nilai Integritas, dan Kanal Pengaduan.**
- 4) **Podcast dan Talkshow digital:** Penyelenggaraan bincang santai melalui kanal digital Diskominfo dengan menghadirkan tokoh inspiratif, praktisi hukum, atau APIP sebagai narasumber.
- 5) **Siaran Radio "Senin Antikorupsi":** Program kolaborasi bersama Merapi FM yang mewajibkan perwakilan Unit Kerja hadir sebagai narasumber setiap hari Senin guna menyuarakan komitmen pelayanan publik yang bersih hingga ke pelosok desa.
- 6) **Kompetisi Nasional:** Seluruh aktivitas kampanye ini akan didokumentasikan dan dinilai untuk diikutsertakan dalam penghargaan nasional KPK kategori *Best Content (Creative Campaign)* dan *Integrated Campaign*.

**c. Lomba Antikorupsi**

Sebagai sarana internalisasi nilai integritas melalui kreativitas, diselenggarakan rangkaian lomba yang melibatkan Aparatur, Pelajar, dan Masyarakat Umum. Informasi lebih detail terkait petunjuk teknis dan jadwal pelaksanaan masing-masing lomba akan diinformasikan lebih lanjut.

Adapun jenis perlombaan yang diselenggarakan adalah:

- 1) **Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM):** Fokus pada edukasi publik mengenai dampak korupsi.
- 2) **Lomba Film/Video Pendek:** Bertema "Integritas dalam Keseharian" untuk kategori umum.
- 3) **Lomba Drama, Puisi, Menggambar dan Cerdas Cermat:** Khusus diselenggarakan bagi jenjang pendidikan SD/SMP/SMA sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter sejak dini.
- 4) **Lomba Poster dan Flyer:** Mengasah kemampuan desain grafis dalam mengomunikasikan pesan antikorupsi secara visual.
- 5) **Lomba Mars/Yel-yel Integritas:** Untuk membangun semangat korps dan kekompakan di lingkungan internal unit kerja.

**d. Program Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi**

Upaya penguatan sistem melalui transformasi dan penataan ulang struktur pengawasan:

- 1) **Penataan Ulang (Restrukturisasi) UPG Pembantu:** Melakukan pembaruan Surat Keputusan (SK) personel Unit Pengendalian Gratifikasi pada setiap Unit Kerja guna memastikan keberfungsian kanal pelaporan gratifikasi. Sebagai langkah penguatan, akan dilakukan **Sosialisasi Program Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi (PAPG)** melalui aplikasi eMonev UPG Pembantu pada laman <http://sirb.boyolali.go.id>, di mana jadwal pelaksanaan sosialisasi akan diinformasikan lebih lanjut.

Tidak hanya berhenti pada aspek administratif, restrukturisasi ini mewajibkan setiap UPG Pembantu untuk secara aktif menjalankan program dan kegiatan yang meliputi:

- a) Penyusunan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG);
  - b) Penunjukan Admin Pengelola Gratifikasi yang kompeten;
  - c) Pelaksanaan Sosialisasi Mandiri di lingkungan internal unit kerja dan eksternal (pengguna layanan);
  - d) Melibatkan *stakeholder* dalam implementasi pengendalian gratifikasi;
  - e) Melakukan Identifikasi Titik Rawan serta menyusun Mitigasi Risiko gratifikasi;
  - f) Diseminasi konten Anti-Gratifikasi secara masif dan berkelanjutan;
  - g) Pemenuhan sertifikasi *E-Learning* Pemahaman Gratifikasi;
  - h) Mendorong penciptaan Inovasi Kegiatan PPG;
  - i) Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi;
  - j) Pembuatan Video Praktik Baik sebagai media edukasi visual;
  - k) Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi (Monev), dan Tindak Lanjut (TL) perkembangan implementasi PPG secara berkala.
- 2) **Transformasi Platform JAGABOY:** Melakukan pengembangan dan pemutakhiran fitur pada aplikasi JAGABOY agar lebih responsif, *user-friendly*, dan terintegrasi dengan sistem Satu Data Boyolali, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pengawasan mandiri.

**e. 5K Run for Integrity**

**Tema: Satukan Langkah, Stop Korupsi!**

Sebagai bentuk kampanye publik yang dinamis dan sehat, diselenggarakan kegiatan lari santai (*fun run*) sejauh 5 kilometer yang mengintegrasikan olahraga dengan pesan-pesan antikorupsi. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa menjaga integritas membutuhkan stamina,

konsistensi, dan keteguhan langkah yang searah antara pikiran dan perbuatan.

- 1) **Filosofi Kegiatan:** Setiap langkah dalam lari 5K melambangkan niat yang lurus. Satukan langkah bermakna sinergi seluruh elemen Boyolali dalam satu barisan yang sama untuk menghentikan praktik korupsi di segala sektor.
- 2) **Partisipasi Peserta:** Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai BUMD/BLUD, Pelajar, Komunitas Lari, dan Masyarakat Umum sebagai wujud kolaborasi inklusif dalam pemberantasan korupsi.
- 3) **Rute Edukasi:** Sepanjang rute lari akan ditempatkan atribut kampanye pariwisata antikorupsi dan pos-pos edukasi yang menyajikan informasi mengenai nilai-nilai integritas serta saluran pengaduan pelanggaran.
- 4) **Deklarasi Bersama:** Kegiatan diakhiri dengan aksi simbolis "Satukan Langkah" di garis finish sebagai bentuk deklarasi kolektif untuk mewujudkan Boyolali yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
- 5) **Output Kegiatan:** Terbangunnya kesadaran massa dan dukungan publik yang lebih luas terhadap program Gebyar Integritas, serta terciptanya atmosfer sosial yang menolak segala bentuk perilaku koruptif di lingkungan Kabupaten Boyolali.

## 2. Rembug Integritas

Kegiatan ini mengedepankan dialog interaktif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat:

- a. **Talkshow Antikorupsi:** Diskusi panel bersama pimpinan daerah dan narasumber ahli (KPK/Akademisi) untuk menyelaraskan persepsi mengenai arah kebijakan pembangunan yang bersih.
- b. **Sosialisasi:** Sosialisasi mengenai Survei Penilaian Integritas (SPI), kewajiban LHKPN, Monitoring, *Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP), dan tata cara pelaporan gratifikasi, bagi pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan.

## 3. Grebeg Integritas (Puncak Acara)

Sebagai muara dari seluruh rangkaian kegiatan, diselenggarakan kegiatan puncak yang meliputi:

- a. **Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda):** Pemaparan hasil pengawasan internal dan capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun berjalan sebagai wujud akuntabilitas publik.
- b. **Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia):** Upacara bersama atau resepsi yang diisi dengan penyerahan penghargaan bagi pemenang lomba, pemberian apresiasi kepada unit kerja, serta peluncuran inovasi-inovasi pelayanan publik terbaru.

## G. TINDAK LANJUT PELAKSANAAN GEBYAR INTEGRITAS

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan Gebyar Integritas Boyolali, seluruh pemangku kepentingan diinstruksikan untuk melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Seluruh Aparatur Pemerintah (PNS, PPPK, Desa, BUMD, BLUD) dan Organisasi Wanita**
  - a. **Aksi Nyata:** Mengamalkan nilai integritas dalam pelayanan dan dengan tegas **MENOLAK** segala bentuk gratifikasi (uang, barang, fasilitas) dari pihak manapun.
  - b. **Penguatan Kapasitas:**
    - 1) **Khusus CPNS, PPPK, BUMD, BLUD, Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita) serta PNS yang belum pernah mengikuti *e-Learning* Pemahaman Gratifikasi:** Wajib lulus *e-Learning* Gratifikasi KPK dan mengirimkan sertifikat ke tautan: <https://bit.ly/SertifikatElearningKPKByl>

- 2) Auditor, P2UPD dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, untuk mengikuti Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Penyuluh Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK).
  - c. **Partisipasi Aktif:** Mengirimkan delegasi pegawai/anggota untuk mengikuti **5K Run for Integrity** sebagai bentuk komitmen fisik terhadap gerakan antikorupsi dan kampanye gaya hidup sehat tanpa korupsi.
2. **Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah/Kepala Desa, Direksi BUMD/BLUD**
    - a. **Keteladanan (*Tone at the Top*):** Menjadi "**Wajah Pariwara**" dalam konten edukasi dan bersedia menjadi **Narasumber utama** dalam program **Podcast Antikorupsi** serta siaran radio "**Senin Antikorupsi**" sesuai jadwal yang ditentukan.
    - b. **Kampanye Visual:** Wajib memasang spanduk "Gebyar Integritas" di area layanan publik serta menayangkan video/pariwara antikorupsi pada monitor ruang tunggu dan website resmi.
    - c. **Penguatan Sistem:**
      - 1) Memperbarui SK Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pembantu serta **menunjuk Admin yang kompeten** untuk melakukan pelaporan Implementasi Program Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi (PAPG) secara disiplin melalui aplikasi **eMonev UPG Pembantu** pada laman: <http://sirb.boyolali.go.id>.
      - 2) Memetakan titik rawan korupsi di unit kerja masing-masing dan menyusun langkah pencegahannya (mitigasi).
      - 3) Mengaktifkan peran Agen Perubahan untuk membangun Zona Integritas.
    - d. **Komitmen Budaya:** Menjadi pelopor budaya anti-pungli dan memastikan seluruh proses layanan di unit kerjanya berjalan cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan yang tidak resmi.
    - e. **Mobilisasi Massa:** Menggerakkan dan memfasilitasi keikutsertaan staf di unit kerjanya dalam kegiatan lari santai untuk memperkuat solidaritas dan sportivitas antar instansi.
  3. **Direksi BUMD**
    - a. **Dukungan Sumber Daya:** Berpartisipasi aktif dalam penguatan kampanye melalui dukungan pembiayaan kreatif (seperti penyediaan hadiah lomba, penyelenggaraan **5K Run for Integrity** atau alat peraga kampanye) yang bersumber dari anggaran publikasi instansi atau dana tanggung jawab sosial (CSR) yang relevan.
    - b. **Kampanye Mandiri:** Membiayai dan memasang atribut "**Pariwara Antikorupsi**" secara mandiri di titik-titik layanan strategis (seperti kantor pusat, cabang, ATM, atau struk layanan) sesuai standar visual KPK.
    - c. **Internalisasi Biaya:** Memastikan dukungan pembiayaan program ini dikelola secara transparan dan akuntabel sebagai wujud nyata mitigasi risiko korupsi dan benturan kepentingan di sektor bisnis daerah.
  4. **Pengurus PKK dan Dharma Wanita Persatuan**
    - a. **Benteng Keluarga:** Menjadi pelopor pendidikan integritas sejak dini di lingkungan keluarga dan organisasi.
    - b. **Aksi Nyata dan Keteladanan:** Mengamalkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan organisasi dan dengan tegas **MENOLAK** segala bentuk gratifikasi yang dapat mempengaruhi independensi serta marwah organisasi wanita.
    - c. **Penguatan Kapasitas (*E-Learning*):** Wajib mengikuti dan lulus *e-Learning* Pemahaman Gratifikasi KPK serta melaporkan sertifikat kelulusan melalui tautan: <https://bit.ly/SertifikatElearningKPKByl>.

- d. **Partisipasi Kreatif:** Aktif mengirimkan perwakilan anggota untuk mengikuti berbagai kategori Lomba Antikorupsi guna mengasah kreativitas dalam menyampaikan pesan integritas.
  - e. **Mobilisasi Massa (5K Run):** Mengirimkan delegasi anggota untuk berpartisipasi dalam *5K Run for Integrity* sebagai bentuk komitmen fisik terhadap kampanye gaya hidup sehat dan gerakan keluarga anti-korupsi di Boyolali.
5. **Dinas Komunikasi dan Informatika**
- a. **Dirigen Komunikasi:** Mengoordinir seluruh Unit Kerja untuk menayangkan konten kampanye antikorupsi secara serentak di media sosial resmi masing-masing instansi.
  - b. **Manajemen Siaran:** Menyusun jadwal narasumber serta mengelola pelaksanaan **Podcast Antikorupsi** dan siaran radio "**Senin Antikorupsi**" di Merapi FM.
  - c. **Publikasi Terpadu:** Mengatur jadwal penayangan materi pariwisata antikorupsi melalui media luar ruang (*videotron*) dan kanal digital pemerintah daerah.
  - d. **Kolaborasi Kreatif:** Menggandeng konten kreator lokal sebagai **Duta Integritas Digital** untuk mengemas pesan antikorupsi KPK ke dalam konten kreatif berbasis kearifan lokal Boyolali dengan materi resmi KPK.
6. **Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata**
- a. **Fasilitator Utama:** Bertanggung jawab memfasilitasi teknis pelaksanaan *5K Run for Integrity*, mulai dari penentuan rute yang aman dan representatif hingga koordinasi dengan komunitas lari di Kabupaten Boyolali.
  - b. **Mobilisasi Pemuda dan Olahragawan:** Menggerakkan potensi pemuda, organisasi kepemudaan (KNPI, Karang Taruna), dan penggiat olahraga untuk terlibat aktif sebagai peserta maupun relawan dalam mengampanyekan gerakan antikorupsi.
  - c. **Sport Tourism:** Mengemas kegiatan lari ini sebagai bagian dari promosi pariwisata integritas yang dipadukan dengan daya tarik wisata olahraga, guna membangun citra positif Boyolali sebagai daerah yang sehat dan bersih dari korupsi.
7. **Masyarakat Umum dan Pelajar di Boyolali**
- a. **Partisipasi Kreatif:** Mensukseskan dan berpartisipasi dalam rangkaian lomba dan kegiatan *5K Run for Integrity* melalui aksi nyata di lapangan serta aksi digital berupa penyebaran swafoto, video, dan konten pariwisata antikorupsi guna memperluas jangkauan edukasi nilai-nilai kejujuran di tengah masyarakat.
  - b. **Pengawasan:** Menggunakan platform **JAGABOY** untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pungli yang ditemui di lapangan.
8. **Konten Kreator Boyolali**, untuk memproduksi karya visual (Video TikTok/Reels) yang kreatif dan berdampak tinggi (*best content*) guna mendukung raihan penghargaan *Creative Campaign* Pariwisata Antikorupsi.
9. **Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Kabupaten Boyolali**
- a. **Agen Edukasi:** Menjadi motor penggerak dan narasumber utama dalam setiap kegiatan sosialisasi, baik dalam Rembug Integritas maupun siaran radio "Senin Antikorupsi".
  - b. **Pendampingan Teknis:** Memberikan asistensi kepada seluruh Unit Kerja dalam menyusun konten kampanye agar selaras dengan nilai-nilai antikorupsi KPK, namun tetap relevan dengan kearifan lokal.
  - c. **Sertifikasi Kompetensi:** Sebagai Mentyor dan Pendamping, bagi Auditor dan P2UPD yang belum bersertifikat, wajib mengikuti sertifikasi PAKSI melalui LSP-KPK untuk memperkuat barisan penyuluh di Kabupaten Boyolali.

## 10. Insan UPG Terbaik (Pemenang Lomba Insan UPG Boyolali)

- a. **Duta Integritas:** Menjadi mentor dan rujukan utama bagi unit kerja lain dalam pengelolaan gratifikasi dan pembangunan budaya antikorupsi.
- b. **Praktik Baik (*Best Practice*):** Wajib menyusun dan membagikan video "Testimoni Praktik Baik" mengenai keberhasilan pengelolaan UPG di unit kerjanya untuk ditayangkan di media sosial Diskominfo.
- c. **Narasumber Penggerak:** Bersedia menjadi narasumber dalam program sharing session atau podcast untuk menularkan inovasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh admin UPG se-Kabupaten Boyolali.
- d. **Keberlanjutan Inovasi:** Mempertahankan dan mengembangkan inovasi yang telah dibuat agar tetap relevan serta memastikan predikat "Terbaik" tercermin dalam nihilnya laporan pelanggaran integritas di unit kerjanya.

## H. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman operasional pelaksanaan Gebyar Integritas Boyolali sekaligus bentuk sinergi nyata Kabupaten Boyolali dalam menyukseskan program **Pariwara Antikorupsi KPK**.

Informasi lebih lanjut dan seluruh dokumen pendukung (materi visual, panduan lomba, dan administrasi lainnya) terkait rangkaian kegiatan ini dapat diakses dan diunduh melalui tautan resmi berikut: <https://bit.ly/gebyarintegritasBYL2026>

Melalui semangat "**Melayani Tanpa Korupsi**", diharapkan tercipta ekosistem birokrasi yang bersih dan inovatif demi mewujudkan senyum kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI BOYOLALI,



AGUS IRAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

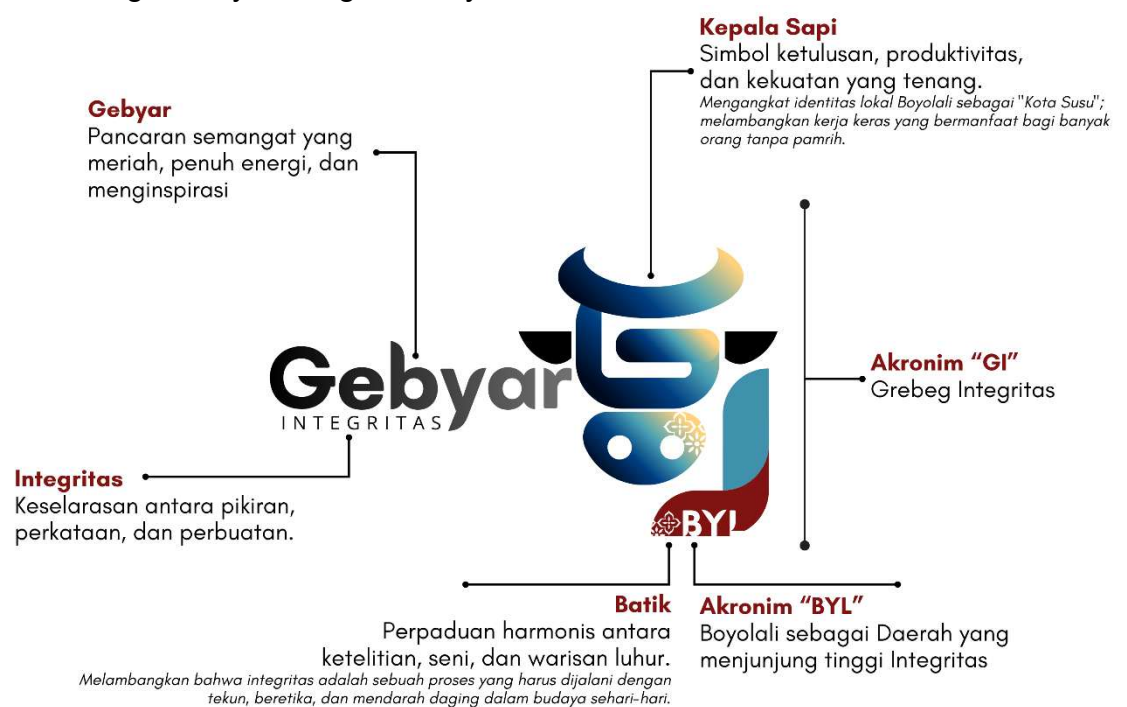
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.

**Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali**  
Jalan Merdeka Barat, Siswodipuran, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 57311  
Telp. (0276) 321021, Faksimile (0276) 321172  
Laman [boyolali.go.id](http://boyolali.go.id), Pos-el [Bupati@boyolali.go.id](mailto:Bupati@boyolali.go.id)

## 1. Logo Gebyar Integritas Boyolali



## 2. Filosofi Logo Gebyar Integritas Boyolali



- Melambangkan profesionalisme, ketenangan, dan kepercayaan yang mendalam.
- Memancarkan energi, keberanian, dan semangat yang menyala.
- Simbol ketegasan, kekuatan formal, dan dasar yang kokoh.
- Melambangkan optimisme, kejayaan, dan kecerdasan.